

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

¹ Sherly Novita Sary, ² M. Kendry Widiyanto, ³ Dida Rahmadanik,
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Email : sherlynovi0411@gmail.com, Email : kenronggo@untag-sby.ac.id, Email : didarahma@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis : sherlynovi0411@gmail.com

Abstract. This research was conducted with the aim of analyzing the effectiveness of community empowerment through the uninhabitable housing (Rutilahu) program in the city of Surabaya to improve community welfare. This research uses qualitative research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the effectiveness of community empowerment through the uninhabitable housing (Rutilahu) program in the city of Surabaya to improve community welfare has been effective in several aspects but still has shortcomings in the socialization aspect of the program. Even though the program has been successful in achieving targets, there are still shortcomings in socializing the program to the community. The large number of people who do not know about this program shows that outreach efforts need to be increased to be more optimal. By conducting regular direct outreach, going around to every sub-district and RW to hold outreach and invite the public so that people also know about this program.

Keywords: program effectiveness, community empowerment, community welfare

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Surabaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Surabaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah efektif dalam beberapa aspek namun masih memiliki kekurangan pada aspek sosialisasi program. Meskipun program telah berhasil dalam mencapai sasaran, masih ada kekurangan dalam sosialisasi program kepada masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang program ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi perlu ditingkatkan agar lebih maksimal. Dengan cara melakukan sosialisasi langsung secara berkala, berkeliling ke setiap kelurahan maupun ke RW untuk mengadakan sosialisasi dan turut mengundang masyarakat agar masyarakat juga mengetahui tentang program ini.

Kata Kunci : efektivitas program, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan budaya, agama, kepercayaan, dan gender yang berbeda-beda. Sebagai negara yang besar dan beragam, Indonesia tidak luput dari berbagai permasalahan sosial. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling serius. Menurut BPS, kemiskinan diartikan sebagai “ketidakmampuan individu dalam memahami kebutuhan dasar untuk hidup”. Lebih lanjut, Kemiskinan timbul karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemakmuran suatu negara secara keseluruhan dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga

kesejahteraan negara secara keseluruhan dapat dicapai melalui upaya pengentasan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang perlu terus dikaji dan dicari solusinya. Bukan saja karena permasalahan kemiskinan sudah lama ada dan menjadi permasalahan nasional, namun juga karena gejala kemiskinan yang semakin meningkat sebanding dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Pengertian kemiskinan tidak mencakup terpenuhinya kebutuhan pokok dan di tempat tinggal seseorang saja, tetapi rendahnya pendapatan manusia, kurangnya lapangan kerja tetap, rendahnya pendidikan dan kesehatan, serta masa depan yang buruk. Oleh karena itu, ini adalah pengentasan kemiskinan prioritas bagi semua pemerintah. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Hal ini didasarkan pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Program kebijakan kemiskinan suatu pemerintah merupakan salah satu indikator efektivitas program tersebut. Berdasarkan program kebijakan pemerintah pada peningkatan kapasitas masyarakat berupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan sekaligus memperkuat kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengentasan Kemiskinan, upaya peningkatan kualitas hidup dilakukan melalui inisiatif kebijakan seperti bantuan keuangan langsung, pemberian bantuan fisik berupa barang, dan peningkatan ketahanan masyarakat

Menurut Purnamasari (2015), kemiskinan didasari adalah perilaku yang dilakukan dengan mengubah pola pikir individu dan masyarakat. Akibatnya, pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud melalui partisipasi masyarakat. Pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat harus menciptakan perubahan sosial tertentu. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya strategi. Dalam pelaksanaannya, tujuan pemberdayaan adalah untuk mendidik masyarakat setempat agar dapat menjalankan tugas sehari-hari dan mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, prosesnya harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara sistematis, berkesinambungan, dan berkesinambungan. Mengingat era saat ini, masyarakat umum telah menjadi pemain kunci dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah partisipasi aktif masyarakat dalam menjamin keberhasilan suatu proyek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat sering disamakan dengan pembangunan masyarakat karena menitikberatkan pada kurangnya pengetahuan dalam penerapannya di masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di konseptualisasikan sebagai tindakan kolektif yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat lokal menyelesaikan konflik, membangun kepercayaan dan mentransfer sumber daya sehingga pada

akhirnya memiliki potensi ekonomi, sosial dan ekologi yang lebih besar. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan, yang memerlukan kemajuan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam jangka panjang.

Kemandirian masyarakat tidak bisa dicapai secara cerpat atau segera, dalam bahwa serangkaian kegiatan pemberdayaan yang ditujukan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui upaya yang dilakukan dan untuk kepentingan masyarakat luas, diharapkan inisiatif pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efisien. Konsep pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan kesetaraan, keadilan dan dukungan terhadap masyarakat, sehingga belum meningkatkan Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk menjadikan pembangunan lebih berorientasi pada masyarakat tidak lepas dari penguatan masyarakat sebagai model pembangunan yang berdimensi kerakyatan.

Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum di perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kepuasan kebutuhan masyarakat. Bentuk kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan menjawab kebutuhan hidup sehat dan aman. Jumlah penduduk yang pendapatannya masih tergolong sedikit menyebabkan sangat banyak rumah yang tidak layak huni.

Menurut Pasal 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, rumah adalah suatu bangunan yang berlantai dasar yang berfungsi sebagai tempat pertemuan yang layak untuk berkumpul, sarana keluarga, harkat dan martabat permukiman, tempat penyimpanan barang-barang. penghuninya, dan rumah kumpulan sebagai bagian dari pemukiman. Sarana dan kutilitas biasanya digunakan sebagai hasil akhir dari rumah yang terawat baik. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pemerintah melaksanakan berbagai proyek pembangunan rumah dengan menggandeng berbagai pihak. Badan Usaha Milik Negara ini tidak bertentangan dengan tujuan negara, sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat dilihat dari beberapa keberhasilan program yang dilaksanakan dalam menciptakan kohesi sosial di kalangan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program yang disebut Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan ini merupakan cara untuk mendorong keswadayaan masyarakat

umum dalam berbagai bentuk, seperti bantuan keuangan, tenaga terkait pekerjaan, dan hubungan lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan lingkungan sekitar secara umum serta kehidupan penerima bantuan itu sendiri, teman dan keluarganya, tetangga, serta warga sekitar lainnya. Alhasil, bantuan dalam jumlah besar bisa digunakan untuk membuat renovasi atau peningkatan kualitas rumah menjadi lebih menyenangkan.

Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus merupakan salah satu programnya. Hal ini merupakan bantuan pemerintah berbasis stimulus yang diharapkan mampu mendukung anggota penerima bantuan miskin agar dapat bekerjasama dengan pemerintah bantuan miskin lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memelihara rumah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan subsidi pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari yang layak. Biasanya, peluang kerja bagi MBR meliputi pekerja bangunan, buruh, pemulung, pembantu rumah tangga, dan penyapu jalan. Hasil kerja MBR ini sendiri masih jauh dari mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sebab, sebagian besar gaji bulanan mereka masih berada di bawah standar upah minimum yang berlaku. Sebagaimana peraturan Menteri ini, pemerintah Kota Surabaya memaksimalkan fungsi sosial dari rumah tangga itu sekaligus memaksimalkan pemberdayaan masyarakat di tingkat pemerintah melalui Program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan salah satu inisiatif utama Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat guna memperbaiki kondisi sosial dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pedoman pelaksanaan program ini terlampir pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 tahun 2024 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Program Rehabilitasi Sosial Perumahan Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan inisiatif untuk memperbaiki kondisi organisasi dan sosial masyarakat di Kota Surabaya, serta memperbaiki lingkungan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Surabaya agar tertangani dengan baik dari segi perbaikan. Pemerintah Kota Surabaya kini tengah berupaya melaksanakan Program Dandan Omah atau yang dikenal dengan Rutilahu. Karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengedepankan perlunya mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Program Rutilahu dikelola melalui APBD. Berikut jumlah rumah yang sudah dikembangkan pada tahun 2021 hingga 2023:

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Yang Sudah Terealisasi

Tahun	Unit
2022	950 Unit
2023	2.700 Unit

Sumber : DPRKPP Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, Program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya sangat berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Penerima program Rutilahu ada kriteria dan standar yang harus dipenuhi. Kriteria utama adalah warga Surabaya yang tercatat dalam catatan MBR dan belum menerima dana hibah unrtuk perbaikan Rutilahu, kecuali dalam keadaan darurat atau masyarakat yang tidak mampu serta jelas akan akta kepemilikan tanah, Di sisi lain, perbaikan juga harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain dinding dan atap yang kondisinya sangat buruk atau dapat menimbulkan bahaya keselamatan penghuninya. Selain itu, lantainya lebih rendah dari gorong-gorong, dan Lantai yang digunakan masih terbuat dari bahan seperti tanah, kayu, bambu, semen dan keramik pecah sehingga puing-puingnya dapat melukai warga. Selain itu, rumah-rumah tersebut juga tidak memiliki toilet atau toilet, atau meskipun memiliki toilet, namun kondisinya tidak memadai, tidak ada penutup atau saluran drainase. Untuk menerima bantuan tersebut, penerima harus menandatangani beberapa surat pernyataan, antara lain rumah atau tanah tersebut tidak dipermasalahkan, mereka akan tinggal sendirian di rumah yang telah diperbaiki, dan juga tidak diperlukan keberatan dari pihak keluarga.

Alur pelaksanaan program ini dimulai dengan adanya sosialisasi di tingkat kelurahan, setelah di adakan sosialisasi pihak RT/RW akan merekomendasikan calon penerima dan memberikan datanya kepada lurah. Pada tahap ini seringkali akan muncul beberapa masalah seperti skala prioritas utama akan dituju pada kondisi rumah yang benar-benar butuh perbaikan. Menyikapi hal ini kerap kali masyarakat tidak menerima keputusan sehingga muncul rasa iri satu sama lain, selain itu adanya kedekatan kekeluargaan dengan pihak-pihak yang bertugas akan mempengaruhi siapa dahulu yang akan menerima bantuan ini meskipun rumahnya masih tergolong sebagai rumah layak huni. Hal ini berdampak negatif pada masyarakat yang rumahnya rusak karena tidak dilirik oleh pihak berwenang. Pertimbangan lainnya adalah kurangnya waktu pemrosesan yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi pertanahan sehingga mengakibatkan dilaksanakannya Program Rehabilitasi. Kendala lain muncul dari program andalan Pemkot

Surabaya, yakni pembangunan perumahan tidak layak huni (Rutilahu) ternyata rumah di sebelah ikut terdampak rusak bahkan roboh. Melihat latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan analisis dengan menggunakan judul. **“Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progam Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Pembangunan

Seluruh proses pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut administrasi. (Siagian, 2009). (Pasolong, 2008) Administrasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang rasional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ia menyatakan bahwa administrasi memiliki dua dimensi: karakteristik dan ketidakpastian. Ciri-ciri yang paling menonjol dalam administrasi adalah efisien, efektif, dan rasional.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

BPS Kota Surabaya (2022) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian kapasitas manusia untuk membangun berbagai komponen kehidupan. IPM didirikan melalui penerapan tiga dimensi mendasar. Dimensi tersebut terkait umur panjang dan sehat, peran empat dan kehidupan yang adat. Dimensi ketiga mempunyai informasi yang sangat sedikit karena berkaitan dengan beberapa faktor. Mengukur dimensi kesehatan dengan cara harapan hidup lahir. Selanjutnya untuk menurunkan pemahaman siswa digunakan indikator angka melek dan rata-rata lama pembelajaran. Indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok untuk mengukur dimensi hidup layak, adapun, digunakan untuk mengukur pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Widjaja, 2002) Dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang, atau pemberian otonomi pada tingkat yang lebih rendah, yang hakikatnya adalah pemberdayaan, yaitu upaya untuk membangkitkan seluruh kemampuan yang ada untuk menjadikan daerah lebih mampu dan mandiri, yakni mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri khasnya sebagai suatu komunitas dan membangun kesejahteraan komunitas tersebut.

Konsep Efektivitas

(Siagian, 2001) yang dimaksud dengan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditentukan terlebih dahulu untuk menghasilkan serangkaian barang atas jasa kegiatan yang dilakukan.

Pengukuran Efektivitas

Menurut (Budiani, 2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut: Ketepatan sasaran, Sosialisasi program, Pencapaian Tujuan program, dan Pemantauan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. fokus penelitian yang peneliti ambil adalah mengenai Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya, yang di dalamnya menyangkut tentang gambaran : Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program, dan Pemantauan Program. Untuk lokasi penelitian peneliti melakukan penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari laporan hasil kegiatan program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Sedangkan data yang berupa dokumen dan literatur merupakan data yang diperoleh peneliti dari buku-buku dan internet, serta dari sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Ada kemungkinan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis dapat digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan ekstraksi kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Sasaran Program

Menurut Budiani ketepatan sasaran mengacu pada sejauh mana dalam menentukan penerima program telah mengikuti standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dibuat dengan tujuan dan sasaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program RUTILAHU dengan menganalisis indikator kerjanya. Pemerintah melalui DPRKPP telah sukses melaksanakan program RUTILAHU untuk merehabilitasi rumah warga kurang

mampu. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas dari rumah yang kondisi rumahnya tidak layak huni.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program RUTILAHU yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui DPRKPP telah berhasil mencapai tujuannya. DPRKPP terlibat langsung untuk menentukan penerima manfaat. Mereka ikut melakukan survei secara menyeluruh, yang menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan manfaat dari program ini. Setelah survei, Dinas memverifikasi data untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diperoleh. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program ini hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan. dan membutuhkannya. Efektivitas program RUTILAHU dapat diketahui melalui analisis indikator kinerjanya. Jika program berhasil merehabilitasi rumah warga kurang mampu hingga dapat meningkatkan kualitas rumahnya, maka program tersebut dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuannya. Untuk menentukan tingkat keberhasilannya, dapat dilihat seberapa baik program ini dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.. Jika program berhasil meningkatkan kualitas rumah, maka dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program RUTILAHU telah berhasil dalam mencapai ketepatan sasaran dengan melibatkan partisipasi aktif dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), melakukan verifikasi data, dan efektif dalam meningkatkan kualitas rumah warga kurang mampu sesuai dengan tujuan program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sosialisasi Program

Menurut Budiani sosialisasi program adalah kemampuan mengkomunikasikan informasi program kepada masyarakat. Sosialisasi program merupakan langkah awal dalam menentukan keberhasilan program. Hal ini dilakukan untuk memahami beberapa aspek sosialisasi program yang efektif sehingga informasi mengenai program tersebut dapat terkomunikasikan kepada masyarakat umum dalam waktu yang minimal.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa poin penting yang dapat dianalisa terkait dengan sosialisasi program RUTILAHU yang dilakukan pemerintah melalui DPRKPP. Sosialisasi program dilakukan dengan pemangku kepentingan seperti kecamatan, KTPR, LPMK, RT/RW, dll. Namun, ada kelemahan dalam melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang bukan anggota organisasi di lingkungan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan program masih terbatas. Karena terbatasnya sosialisasi, sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui tentang program

RUTILAHU dan alur pendaftarannya. Masyarakat yang bukan anggota organisasi atau tidak aktif mengikuti kegiatan di lingkungannya mungkin tidak akan mendapat informasi secara optimal. Perlu dilakukan evaluasi efektivitas sosialisasi yang dilakukan. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengintensifkan upaya sosialisasi program RUTILAHU agar informasi mengenai program RUTILAHU dapat dikomunikasikan secara lebih efektif dan komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program RUTILAHU belum berhasil dalam mensosialisasikan program ini secara maksimal karena masih banyak sebagian dari masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini dan bagaimana alur pendaftarannya.

3. Pencapaian Tujuan Program

Menurut Budiani tentang pencapaian tujuan program adalah sejauh mana hasil aktual program memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan merupakan puncak dari suatu proses. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemahaman yang baik terhadap program tersebut. Jika suatu program semakin banyak memberi manfaat maka program tersebut dapat dinilai sudah efektif.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program RUTILAHU yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui DPRKPP telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program RUTILAHU bertujuan demi meningkatkan mutu rumah tidak layak huni masyarakat di Kota Surabaya. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, tujuan tersebut tampaknya telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berhasil memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas rumah dan kondisi lingkungan mereka.

Keberhasilan pencapaian tujuan program menunjukkan efektivitas pelaksanaan program RUTILAHU. Program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan kondisi rumah dan lingkungannya. Dengan memperbaiki rumah untuk kedepannya diharapkan bisa memperbaiki kualitas kesehatan dan kualitas lingkungannya agar terlihat tidak kumuh. Dengan adanya program ini masyarakat bisa lebih fokus pada kebutuhan hidup yang lainnya. Sebagaimana tercatat dalam data, terdapat hambatan dalam pelaksanaan program, namun petugas yang terlibat telah berhasil mengatasi hambatan tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan program. Oleh karena itu, berdasarkan analisa di atas, peneliti menyimpulkan bahwa program RUTILAHU yang dilaksanakan oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

dan menunjukkan efektivitasnya dalam memberi manfaat nyata kepada masyarakat Kota Surabaya.

4. Pemantauan Program

Menurut teori efektivitas Budiani tentang pencapaian tujuan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah program adalah bentuk perhatian terhadap penerima manfaat. Pemantauan program berfokus selama proses pelaksanaan program, membandingkannya atas prosedur dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil program berbeda berdasarkan prosedur yang diharapkan maka harus dilakukan perbaikan untuk menyempurnakannya..

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program RUTILAHU yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat melalui DPRKPP telah diawasi dan dimonitor dengan cukup efektif. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, bersama dengan pihak terkait seperti KTPR, LPMK, dan RT/RW, telah melakukan pemantauan program secara langsung. Hal ini menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa program bertindak sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya melaksanakan evaluasi program setiap tahun bersama dengan KRPR. Ini menunjukkan adanya upaya untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja program secara berkala, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan jika diperlukan. Oleh karena itu berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi program RUTILAHU telah dilakukan dengan cukup efektif oleh pemerintah setempat. Hal ini menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program dapat Mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah selesai, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Surabaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah efektif dalam beberapa aspek namun masih memiliki kekurangan pada aspek lainnya. Program Rutilahu efektif dalam mencapai ketepatan sasaran dengan partisipasi aktif dari instansi terkait dan verifikasi data yang baik. Ini membuktikan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas rumah warga kurang mampu sesuai dengan tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun program telah berhasil dalam mencapai sasaran, masih ada kekurangan dalam sosialisasi program

kepada masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang program ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi perlu ditingkatkan agar lebih maksimal. rogram ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni. Dinas terkait telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga program ini dapat dianggap sukses dalam hal pencapaian tujuan. Program ini juga telah diawasi dengan baik oleh pihak terkait, seperti Dinas, KTPR, LPMK, dan RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, memberikan keyakinan bahwa pembangunan rumah dilakukan dengan benar.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai, penulis mempunyai beberapa masukan untuk Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya agar kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi yaitu :

1. Untuk sosialisai program karena Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini, sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya melakukan sosialisasi langsung secara berkala, berkeliling ke setiap kelurahan maupun ke RW untuk mengadakan sosialisasi dan turut mengundang masyarakat agar masyarakat juga mengetahui tentang program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. (2010). *Pengantar administrasi pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.
- Chan, W. (2022). Warga menanti tanggung jawab Pemkot Surabaya akibat rutilahu. Retrieved from <https://www.rri.co.id/surabaya/daerah/95628/warga-menanti-tanggung-jawab-pemkot-surabaya-akibat-rutilahu>
- Dinsos Surabaya temukan banyak tanah rutilahu yang masih sengketa. (2021). Retrieved from <https://jatim.jpnn.com/dadi-omongan/6275/dinsos-surabaya-temukan-banyak-tanah-rutilahu-yang-masih-sengketa>
- Pasolong, H. (2008). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan

Rumah Khusus. (2022). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216844/permen-pupr-no-7-tahun-2022>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2010).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. (2024).

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2011).

Widjaja. (2002). *Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.